



PUTUSAN

Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

MENOL WIDIYASTUTI binti BUDI SOETRISNO, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 10 April 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Catering), tempat kediaman di Jl. Sunan Giri No.39 RT.05 RW.04, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagai Penggugat;
melawan

MOHAMMAD IRFAN MUNIR bin DJAFAR, Malang, 04 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Arsitek, tempat kediaman di Jl. Sunan Giri No.39 RT.05 RW.04, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Agama Kota Kediri tertanggal 15 Oktober 2020 yang

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



terdaftar pada register perkara Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Kdr. tanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 1994 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1414 H., yang dicatat oleh KUA Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 911/9/II/1994, tanggal 05 Februari 1994;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Sunan Giri No.39 RT.005 RW.004 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang bernama:
 - WULANG WINUDHARTA, Laki-laki, umur 25 tahun
 - YUDHISTIRA AL ALIM, Laki-laki, umur 22 Tahun
 - LINTANG KINASIH, Perempuan, umur 17 tahun
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 setelah menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
 - antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang berkomunikasi;;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2020 yang disebabkan: Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



tangganya dengan Tergugat dikarenakan sifat Tergugat yang sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 3 bulan;

7. Bahwa selama pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, MOHAMMAD IRFAN MUNIR bin DJAFAR terhadap Penggugat, MENOL WIDIYASTUTI binti BUDI SOETRISNO;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Achmad Yani Arifin, S.Th.I., C.Me., Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Kota Kediri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat:

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 911/9/II/1994 tertanggal 05 Pebruari 1994 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3571025004700003 atas nama Menol Widyastuti (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. Yli S binti Supanagatun, umur 50 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl.Dworowati No. 29 Kelurahan Merican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan sekarang sudah pisah ranjang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat sudah punya wanita lain orang Malang, katanya sudah menukah sirri tetapi Tergugat jarang ke Malang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi mereka tidak bisa disatukan lagi;
2. Ully Sayekti binti Imam Mualam, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Sunan Giri

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



No. 27 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri,
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 dan sudah punya 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2000 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita lain dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa karena sering bertengkar akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi mereka tidak bisa disatukan lagi;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan, begitu pula Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapai uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Pebruari 1994 dan ikatan perkawinan tersebut

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis juga sudah memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita lain dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 3 bulan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 911/9/II/1994 tertanggal 05 Pebruari 1994 (P.1), dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Menol Widiyastuti (P.2), serta dua orang saksi bernama Yuli S dan Uly sayekti yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994, rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan akibatnya sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 bulan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Penggugat sebagai penduduk wilayah Kota Kediri, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah teman dan keponakan Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 05 Pebruari 1994;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan maka antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur yang hingga sekarang selama 3 bulan berturut-turut dan selama pisah pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختارالاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة
المزوجين ولم يعد يذفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعناه
ان يحكم على احد الزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تبابه
روح المعدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (**MOHAMMAD IRFAN MUNIR bin DJAFAR**) terhadap Penggugat (**MENOL WIDIYASTUTI binti BUDI SOETRISNO**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Kediri, pada hari **Selasa** tanggal **01 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Rabiul Tsani 1442 Hijriyah**, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

MULYADI, S.Ag.
Hakim Anggota

Drs. AKHMAD MUNTABA, M.H.
Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	700.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu
ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Kdr.